



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

SOSIAL BUDAYA DAN KEBERAGAMAN

Jumat, 18 Agustus 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. MENERUSKAN TUJUAN KEMERDEKAAN, MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 – *Media Online Kompas*
2. KETERKAITAN ESG, CSR DAN SDGs: MENGAPA KITA HARUS MEMAHAMINYA?  
(1) – *Media Online Media Indonesia*

## MEMERUSKAN TUJUAN KEMERDEKAAN, MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

Dalam perjalanan 78 tahun bangsa Indonesia merdeka, publik menilai tujuan kemerdekaan masih belum tercapai secara maksimal. Situasi ini memberi sinyal agar visi Indonesia 2045 perlu diperjuangkan dengan langkah-langkah ekstra dan terukur.

VINCENTIUS GITYARKO

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea keempat, termuat empat tujuan utama kemerdekaan. Keempat tujuan tersebut, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertuhan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, keempat tujuan kemerdekaan ini nyatanya mendapat apresiasi positif meskipun masih menyimpan tantangan. Jika dilihat secara umum, publik cenderung menilai bahwa bangsa Indonesia sejauh ini sudah mencapai sebagian dari tujuan kemerdekaan Indonesia, bahkan sebagian kecil menilai sudah tercapai sepenuhnya. Sementara sebagian yang lain menilai bangsa Indonesia belum mencapai tujuan kemerdekaan sepenuhnya.

Penilaian publik ini terpancip dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung pada 8-11 Agustus 2023. Dari empat tujuan kemerdekaan, melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia menjadi poin yang paling problematis dengan penilaian negatif paling tinggi. Sebanyak 42,8 persen responden menilai tujuan pertama dari kemerdekaan Indonesia ini belum tercapai sepenuhnya.

Sementara itu, sebanyak 49,3 persen responden menyatakan bahwa dalam tujuan ini bangsa Indonesia telah mencapai sebagian. Hanya sekitar 6,4 persen responden yang menilai bahwa tujuan ini sudah tercapai sepenuhnya. Beranjak pada tujuan berikutnya, memajukan kesejahteraan umum, terlihat catatan mirip dengan tujuan pertama.

Sebanyak 41,7 persen menilai bangsa Indonesia belum mencapai sepenuhnya tujuan kedua kemerdekaan Indonesia ini. Di kutub sebaliknya, sebanyak 49,8 persen responden menilai kesejahteraan umum sudah tercapai sebagian. Sementara terdapat 5,4 persen responden yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum sudah tercapai sepenuhnya.

Dalam hal melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah

### ANALISIS Litbang Kompas

dan kesejahteraan umum, penilaian publik yang demikian bisa ditelusuri dari beberapa data lain. Berbicara soal perlindungan seluruh rakyat, hal ini tak bisa dilepaskan dari perlindungan sejak generasi-generasi baru dilahirkan.

Dari data BPS yang dirilis tahun 2022 dapat dilihat pada tahun 2017, dari 1.000 bayi yang dilahirkan ada 24 yang meninggal. Pada 2024 pemerintah mengungkapkan angka kematian bayi turun menjadi 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

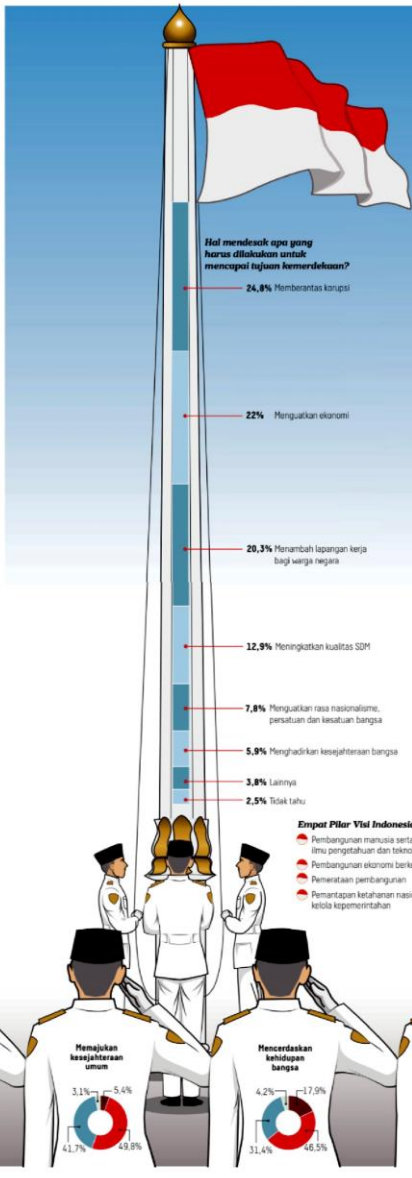
Angka kematian bayi masih terkait erat dengan kesehatan ibu hamil secara khusus dan kesehatan penduduk secara umum. Masih problematisnya kesehatan dan kesejahteraan ini dikaitkan dengan catatan lain bahwa angka kematian balita yang masih lebih tinggi ketimbang angka kematian bayi. Pada tahun 2017, terdapat 32 anak balita meninggal dari 1.000 yang lahir hidup. Dengan kata lain, generasi baru yang dilahirkan hidup masih harus menghadapi risiko kematian yang malah lebih tinggi dalam lima tahun kehidupan pertamanya.

Problem kesejahteraan manusia Indonesia juga dapat dilihat dari prevalensi tendensi yang masih tinggi. Angka stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen pada 2022. Meskipun sudah menurun dari angka tahun sebelumnya, yaitu 24,4 persen, prevalensi tendensi di Indonesia masih masuk kategori tinggi dengan standar WHO yang berada di bawah 20 persen.

Dalam tujuan selanjutnya, publik memujikan penilaian yang masih tinggi. Angka stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen pada 2022. Meskipun sudah menurun dari angka tahun sebelumnya, yaitu 24,4 persen, prevalensi tendensi di Indonesia masih masuk kategori tinggi dengan standar WHO yang berada di bawah 20 persen.

Publik menilai bahwa bangsa Indonesia sudah mencapai sepenuhnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara 41,7 persen menilai bangsa Indonesia belum mencapai sepenuhnya tujuan kedua kemerdekaan Indonesia ini. Di kutub sebaliknya, sebanyak 49,8 persen responden menilai kesejahteraan umum sudah tercapai sebagian. Sementara terdapat 5,4 persen responden yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum sudah tercapai sepenuhnya.

Dalam hal melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah



Namun, jika melihat tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2022, tampak bahwa porsi terbesar masih di penduduk berpendidikan dasar, yakni tidak tamat SD, lulus SD dan SMP. Dalam kategori ini, BPS mencatat ada sebanyak 54,68 persen penduduk. Bahkan, masih ada 2,4 persen penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah.

Berikutnya, terdapat 29,97 penduduk masuk dalam kategori berpendidikan menengah, yakni lulus SMA. Sementara hanya 10,15 persen penduduk yang mampu meramatkan perguruan tinggi. Berdasarkan angka pendidikan ini, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini.

Penilaian paling positif di antara keempat tujuan ini ditunjukkan dalam peran Indonesia di kancah internasional. Sebanyak 50 persen responden menilai tujuan melaksanakan ketertuhan dunia sudah tercapai sebagian. Bahkan, 18,6 persen responden menilai tujuan ini sudah tercapai sepenuhnya.

Hanya sekitar 28 persen responden menilai keterlibatan Indonesia dalam melaksanakan ketertuhan dunia belum tercapai sepenuhnya. Meskipun cenderung bernilai positif, secara umum penilaian publik ini sejatinya masih menyiratkan keterbelakangan. Di balik penilaian positif ini, publik cenderung ragu untuk mengatakan selangkah bahwa tujuan kemerdekaan sudah tercapai.

Jika dirata-rata masih ada sekitar 36 persen responden yang menilai bangsa Indonesia belum sepenuhnya mencapai tujuan kemerdekaan. Di kutub yang lain, hanya sekitar 12,1 persen yang meyakini tujuan kemerdekaan sudah tercapai sepenuhnya.

Melihat masih ada tantangan dalam mencapai tujuan kemerdekaan, publik menilai beberapa hal mendasar untuk dilakukan. Hal mendasar paling utama, dinyatakan oleh 24,8 persen responden, adalah memerantas korupsi.

Korupsi masih momok besar yang dinilai publik menghambat tercapainya tujuan kemerdekaan. Penilaian ini tidak bisa dilepaskan dari meluasnya kinerja KPK dalam memerantas korupsi belakangan ini ditam-

bah dengan sekerang permasalahan internal lembaga ini. Setelah korupsi, sebanyak 22 persen responden melihat bahwa mengajukan ekonomi menjadi hal mendasar yang harus dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Masih terkait dengan soal ekonomi, 20,3 persen melihat menambah lapangan kerja bagi warga negara menjadi hal krusial untuk dilakukan. Artinya, tujuan kemerdekaan yang paling praktis semestinya di alami oleh masyarakat Indonesia adalah memberikan kehidupan dasar yang layak serta pekerjaan yang dijadikan pegangan hidup.

Indonesia 2045  
Jika bangsa ini ingin menggapai Indonesia Emas 2045, tujuan kemerdekaan menjadi hal krusial yang harus diteruskan dan diperjuangkan. Melihat visi Indonesia 2045, sebagaimana dicantumkan sejak 2019, sebenarnya pemerintah telah menempatkan prioritas yang sejalan dengan tujuan kemerdekaan dalam UU No. 19/2017. Prioritas pertama adalah melindungi setiap generasi yang menjadi bagian dari bangsa ini.

Pilar pertama visi Indonesia Emas 2045 tertulis pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah tampak sadar betul bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci kehidupan di masa yang mendatang. Namun, titik beratnya tetap pembangunan manusia.

Pembangunan manusia yang utuh memerlukan keseriusan mengawal dan memastikan bahwa generasi berikutnya akan lahir dan terlindungi hak-hak dasar hidupnya. Kembali pada hasil jajak pendapat, catatan publik paling tebal masih menitikberatkan pada perlindungan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Artinya, semasih apa pun kemajuan ingin diwujudkan, tujuan kemerdekaan tetap menempatkan manusia Indonesia sebagai sasaran sekaligus pelaku utamanya. Waktu terus bergulir, tersisa waktu 22 tahun lagi untuk mengambill langkah-langkah strategis pembangunan manusia yang ingin diwujudkan pada 2045 sebagai kelanjutan dari tujuan kemerdekaan bangsa ini.

(LITBANG KOMPAS)

### Memurut Anda, apakah saat ini bangsa Indonesia sudah mencapai tujuan kemerdekaan?

- Sudah mencapai sepenuhnya
- Sudah mencapai sebagian
- Belum mencapai sepenuhnya
- Tidak tahu

### Metode Penelitian

Pengukuran pendapat melalui telepon dilakukan oleh Litbang Kompas pada 8-11 Agustus 2023. Sebanyak 510 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Mengatakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin di error penelitian ± 4,35 persen dalam kondisi pemerkaran sampel acak sederhana. Melalui demikian, kesalahan di luar pencocokan sampel dimungkinkan terjadi. Pengukuran pendapat sepenuhnya dibawahi oleh Litbang Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sumber: Laporan dari Litbang Kompas. Data: Litbang Kompas/PTMSP

Jumat, 18 Agustus 2023

## Keterkaitan ESG, CSR, dan SDGs: Mengapa Kita Harus Memahaminya? (1)



**MARIA R NINDITA RADYATI, PhD**  
Ketua ESG Taskforce Kadin  
dan Pendiri Institute for  
Sustainability and Agility

JIKA satu perusahaan ingin melakukan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) ataupun suatu organisasi bermaksud melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan mengikuti standar/kesepakatan global, dapat menggunakan panduan dunia tentang *social responsibility*, yakni ISO 26000. Panduan itu menekankan bahwa suatu organisasi, termasuk perusahaan, harus bertanggung jawab atas dampak yang diciptakan

kepada masyarakat dan lingkungan hidup, terutama dampak yang negatif. Panduan itu juga memberikan banyak sekali rekomendasi berbagai aktivitas yang dapat dilakukan, khususnya di tujuh bidang utama, yakni Tata Kelola Organisasi, Praktik Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia, Isu Konsumen, Praktik Operasi yang Adil, Lingkungan Hidup, dan Pelibatan & Pengembangan Komunitas.

Saat ini ada panduan dan kesepakatan global lain untuk pengungkapan kinerja Lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola, yang dikenal dengan ESG (*environment, social, and governance*). Pengungkapan kinerja ESG menjadi sangat penting, semenjak banyak peristiwa yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, seperti perubahan iklim, pandemi, isu diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan, seperti komunitas, investor, regulator, konsumen, kreditor, karyawan, dan calon pelanggan ingin mengetahui bagaimana kinerja ESG perusahaan. Kinerja itu mencerminkan sejauh mana perusahaan siap mengatasi *uncontrollable events* yang dapat meningkatkan

risiko keuangan. Pengungkapan ESG menunjukkan upaya-upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif kepada ESG dan mengurangi dampak negatif dari operasi bisnisnya.

Agar mudah diperbandingkan para pemangku kepentingan tersebut, penting adanya suatu standar dalam pengungkapan ESG. Terdapat banyak panduan pengungkapan ESG, ada panduan umum yang dapat digunakan semua jenis industri, yang disebut dengan Sector Agnostic, yakni dari IFC (International Finance Corporation). Ada juga yang khusus untuk jenis industri-industri tertentu, seperti SASB (Sustainability Accounting Standard Board). Standar-standar tersebut menuntut perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ESG berdasarkan metrik/indikator masing-masing topik dari ESG.

Contoh dari panduan IFC, yaitu Aspek Environment untuk Topik Efisiensi Energi, maka metrik/indikatornya ialah konsumsi energi (giga watt), % listrik yang digunakan, dan % energi terbarukan yg digunakan. Artinya, perusahaan harus menghitung dan mengun-



kapkan semua indikator tersebut, sedang contoh aspek *social*, topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja, metriknya ialah tingkat cedera (TRIR), tingkat fatalitas untuk karyawan tetap dan kontrak. Contoh Aspek Tata-Kelola,

topik Antikorupsi ialah besarnya denda dan penyelesaian korupsi atau suap (Rp), uraian tentang besarnya denda, dan tindakan ko-rektif yang dilakukan. Selain itu, ada juga metrik yang berupa data kualitatif, misalnya aspek sosial di

topik, dampak aparat keamanan pada masyarakat, metriknya ialah pernyataan, kebijakan, atau kode aparat keamanan, dan interaksi dengan masyarakat setempat (ta-hun). Perlu berikan deskripsi dan disediakan tautannya. (S-1)